

## Evaluasi Kebijakan Program “Kota Solok Menuju 0% Kemiskinan” Melalui Pengembangan UMKM Sebagai Penanggulangan Kemiskinan

Aisyah Zahra<sup>1</sup>, Adzmy Altha Azkiya<sup>2</sup>, Riva Nasrila<sup>3</sup>, Sandro J.O Tampubolon<sup>4</sup>, Syiva Rezki<sup>5</sup>, Rani Kartika<sup>6\*</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Negeri Padang

\*Corresponding author, e-mail: [ranikartika@fis.unp.ac.id](mailto:ranikartika@fis.unp.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program “Kota Solok Menuju 0% Kemiskinan” melalui pengembangan UMKM sebagai strategi penanggulangan kemiskinan. Kajian ini penting dilakukan karena meskipun UMKM diposisikan sebagai sektor yang mampu mendorong pembangunan ekonomi masyarakat dan menurunkan kemiskinan, keberadaannya di tingkat lapangan seringkali menghadapi kendala administratif, keterbatasan modal, serta rendahnya literasi digital dan informasi bantuan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Pasar Raya Kota Solok. Informan dipilih secara purposive sampling sebanyak delapan pelaku UMKM yang menjalankan usaha pada sektor informal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program UMKM sebagai alat penanggulangan kemiskinan belum berjalan optimal. Hambatan yang ditemukan terdiri dari birokrasi bantuan yang rumit, ketidakmerataan akses program, rendahnya pengetahuan mengenai administrasi usaha, serta keterbatasan modal yang menghambat pengembangan usaha. Selain itu, literasi digital yang rendah membuat sebagian besar pelaku UMKM tidak mampu memanfaatkan peluang pemasaran online. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan program masih belum menyentuh kebutuhan nyata pelaku UMKM, sehingga diperlukan perbaikan dalam pendampingan, sosialisasi, serta penyederhanaan prosedur bantuan agar UMKM dapat berkembang dan berfungsi sebagai instrumen efektif dalam penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi kajian lanjutan mengenai pembangunan ekonomi lokal berbasis UMKM serta evaluasi kebijakan intervensi sektor informal di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Kemiskinan; Penanggulangan; UMKM.

### Abstract

This study aims to analyze the implementation of the “Kota Solok Menuju 0% Kemiskinan” program through the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as a strategy to reduce poverty. This research is considered crucial because, although MSMEs are recognized as a sector capable of promoting economic empowerment and reducing poverty, their implementation in the field frequently encounters several obstacles, including complex administrative procedures, unequal access to government assistance, limited business capital, and low digital literacy among MSME actors. A qualitative research method with a case study approach was employed in Solok City’s traditional market area. A total of eight MSME actors were selected as informants using purposive sampling. Data were collected through direct observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that the implementation of MSME programs as a poverty-reduction strategy has not yet operated optimally. The major constraints identified include complicated bureaucratic procedures, limited access to programs, inadequate administrative knowledge, and financial barriers that hinder business expansion. Additionally, low digital literacy prevents many MSME actors from utilizing online marketing opportunities. This study concludes that the current implementation of the program has not fully addressed the real needs of MSME actors. Therefore, improvements in assistance mechanisms, program dissemination, and administrative simplification are required to ensure MSMEs function effectively as an instrument of poverty alleviation. This research contributes to future studies and policymaking in the field of local economic development and interventions in the informal sector.

**Keywords:** Allevation; MSMEs; Poverty.

**How to Cite:** Zahra, A. et al. (2025). Evaluasi Kebijakan Program “Kota Solok Menuju 0% Kemiskinan” Melalui Pengembangan UMKM Sebagai Penanggulangan Kemiskinan. *Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial, Vol. 2 No. 2 Tahun 2025*. (pp. 581-588). Padang: Universitas Negeri Padang.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author.

## Pendahuluan

Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak, seperti pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Dalam pemahaman modern, kemiskinan bersifat multidimensional, artinya tidak hanya soal kekurangan pendapatan, tetapi juga keterbatasan kapabilitas (kemampuan dasar), akses kelayakan sosial, dan partisipasi dalam masyarakat. Secara aspek, kemiskinan dapat dibagi menjadi beberapa dimensi, aspek ekonomi (kurangnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup), aspek sosial budaya yang menunjukkan bagaimana keterbatasan jaringan sosial dan hambatan budaya bisa memperparah kemiskinan, serta aspek politik atau struktural, sturur sosial ekonomi yang tidak adil menghalangi kelompok tertentu mengakses peluang dan sumber daya (Ellya, 2019; Ridho, 2023; Wahyuni, 2014). Penanggulangan kemiskinan harus mempertimbangkan berbagai dimensi ini agar harus mempertimbangkan berbagai dimensi ini agar solusi benar-benar efektif dan menyentuh akar masalah.

Kemiskinan memberi dampak signifikan UMKM di Indonesia, terutama dari beberapa aspek sosial ekonomi, kapasitas, dan struktur yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan dan potensi pemberdayaan UMKM. Secara ekonomi, rendahnya daya beli masyarakat miskin mengurangi pangsa pasar bagi produk UMKM karena konsumen miskin cenderung hanya membeli kebutuhan dasar dan tidak bisa menjadi pelanggan tetap UMKM skala mikro, sehingga omset UMKM berisiko menurun. Aspek kapabilitas juga sangat terpengaruh para pelaku UMKM yang berasal dari latar belakang miskin sering kali memiliki keterbatasan akses modal, pendidikan, dan literasi keuangan, yang menghambat inovasi, ekspansi bisnis, dan kemampuan untuk mengadopsi teknologi. Penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan dan literasi keuangan yang rendah berpengaruh negatif terhadap pendapatan UMKM dan memperkuat kesenjangan pendapatan. Dari struktur sosial, menciptakan siklus dimana UMKM berpotensi sebagai solusi pengentasan kemiskinan, tetapi terbatasnya dukungan infrastruktur, regulasi, dan pembiayaan membuat banyak usaha mikronya sulit berkembang menjadi usaha menengah atau besar (Khoiriyah & Amalia, 2023). Selain itu, beban kemiskinan rumah tangga pelaku UMKM juga bisa berbalik memperburuk situasi rumah tangga UMKM yang miskin akan menghadapi ketidakstabilan pendapatan lebih besar, terutama dalam situasi krisis (seperti pandemi), dan bisa membuat mereka lebih rentan gagal usaha dan kembali ke kemiskinan (Atla, 2021; Wahyuni, 2014). Dampak kemiskinan pada UMKM bersifat ganda kemiskinan kemampuan UMKM untuk tumbuh, sementara UMKM yang tidak bisa tumbuh juga tidak dapat secara maksimal mengentaskan kemiskinan.

Di Sumatera Barat kemiskinan masih muncul dalam beberapa aspek yang saling berkaitan dari aspek ekonomi, ketergantungan pada pendapatan tidak tetap dan rendahnya daya beli di daerah perdesaan, aspek kapabilitas yaitu keterbatasan literasi keuangan, keterampilan bisnis, dan kemampuan mengakses teknologi, aspek akses atau finansial yaitu sulitnya akses modal formal dan pasar bagi pelaku usaha mikro, serta aspek struktural yaitu kesenjangan infrastruktur dan ketimpangan kesempatan antar nagari atau kabupaten (BPS, 2025). Data BPS menunjukkan bahwa meskipun persentase kemiskinan di Sumatera Barat mengalami penurunan secara agregat menjadi sekitar 5.35% pada Maret 2025, ketidakmerataan antara perkotaan dan pedesaan serta kantong-kantong kemiskinan tetap menjadi tantangan (BPS, 2025). Pemerintah provinsi dan (Dinas Koperasi UMKM Sumbar, 2023). Pemerintahan kabupaten/kota menanggapi masalah ini dengan strategi yang memosisikan UMKM sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, program inkubasi bisnis dan layanan pendampingan untuk naik kelas pelaku usaha, pelatihan kewirausahaan, fasilitas akses pembiayaan serta program nagari/komunitas seperti Nagari Mandiri Pangan yang meningkatkan ketahanan dan sumber pendapatan rumah tangga di tingkat lokal. Pendekatan ini mencoba menutup beberapa stasi sekaligus meningkatkan kapabilitas pelaku (pelatihan dan mentoring), memperlebar akses finansial dan pasar, serta memperbaiki kondisi struktural melalui program terintegrasi ditingkat nagari/kabupaten.

Fenomena ini yang juga mencerminkan di Kota Solok, mengindikasikan adanya ketidakmerataan akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan peluang kerja formal. Dalam konteks ini, usaha mikro kecil

---

dan menengah (UMKM) muncul sebagai salah satu harapan utama dalam menggerakkan perekonomian rakyat dan mengurangi angka kemiskinan. UMKM diakui sebagai tulang punggung ekonomi nasional karena kontribusinya yang substansial terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan kemampuan menyerap tenaga kerja hingga lebih dari 97% dari total angkatan kerja di Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM., 2023; Pratama, 2022). Secara teoritis, UMKM memiliki probabilitas kuat sebagai jalan keluar yang representatif untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan cara menciptakan lapangan kerja dan mendistribusikan pendapatan secara langsung kepada masyarakat lapisan bawah (Sacipto & Rachmawati, 2022). Dalam berita Pemkot Solok, pemerintah Kota Solok sangat ambisius dalam menurunkan kemiskinan ekstrem dan telah menetapkan target menekan angka kemiskinan hingga 0% melalui tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD), dengan strategi pemetaan keluarga miskin agar bantuan sosial dan program pemberdayaan bisa benar-benar menasar warga yang sangat rentan (Antoni, 2023).

Penelitian terkait peran UMKM dalam pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan dan menunjukkan hasil yang konsisten bahwa UMKM memiliki kontribusi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ariani et al. (2024) menemukan bahwa pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan akses modal mampu memperkuat pendapatan masyarakat secara berkelanjutan, terutama setelah pandemi Covid-19. Siagian et al. (2025) juga menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku usaha apabila program pendampingannya berjalan secara terstruktur. Eksistensi UMKM juga memiliki kontribusi nyata dalam mengurangi tingkat kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas usaha (Diwayana & Burhanuddin, 2023). Penelitian Mulia & Sitepu (2023) menunnukkan bahwa UMKM berperan penting dalam pemerataan pendapatan masyarakat, namun pengembangan UMKM tidak dapat optimal tanpa dukungan kebijakan yang tepat sasaran, terutama dalam bidang permodalan dan pemasaran. UMKM juga memiliki peran langsung dalam mengurangi kemiskinan akibat pengangguran, karena UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan relatif lebih mudah diakses oleh masyarakat berpendapatan rendah (Ferdiana et al., 2023).

Meskipun kelima penelitian tersebut memberikan pemahaman kuat mengenai hubungan UMKM dan penurunan kemiskinan, masih terdapat kesenjangan penelitian yang belum terisi. Tidak ada penelitian sebelumnya yang secara spesifik mengevaluasi implementasi program “Kota Solok Menuju 0% Kemiskinan”, padahal program ini merupakan kebijakan strategis daerah yang menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem melalui penguatan UMKM. Selain itu, belum ada penelitian yang mengevaluasi bagaimana program ini dijalankan di tingkat lokal, apakah dukungan yang diberikan kepada UMKM tepat sasaran, serta sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga pelaku UMKM di Kota Solok. GAP penting ini menunjukkan perlunya penelitian baru yang fokus mengevaluasi program tersebut dari sudut pandang pelaku UMKM maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini difokuskan pada evaluasi implementasi program “Kota Solok Menuju 0% Kemiskinan” melalui pemberdayaan UMKM sebagai strategi pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem. Fokus utama penelitian mencakup pelaksanaan program, jenis dukungan yang diberikan kepada pelaku UMKM, efektivitas pendampingan usaha, serta dampak program terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga memeriksa hambatan-hambatan yang dialami pemerintah dan pelaku UMKM, seperti akses modal, literasi usaha, dan kemampuan pemasaran, untuk melihat apakah program telah berjalan sesuai tujuan.

Rumusan masalah penelitian disusun untuk memberikan arah analisis yang lebih terfokus. Pertama, bagaimana implementasi program “Kota Solok Menuju 0% Kemiskinan” dalam konteks pengembangan UMKM. Kedua, bagaimana kontribusi UMKM terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Solok. Ketiga, apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut, baik oleh pemerintah maupun pelaku UMKM. Keempat, sejauh mana program ini efektif dalam mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem. Dengan rumusan masalah ini, penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh dan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk peningkatan program di masa depan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Raya Solok, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang berlokasi di pusat aktivitas perdagangan Kota Solok dan menjadi salah satu sentra perekonomian masyarakat yang bergerak di sektor informal. Lokasi ini dipilih karena terdapat berbagai pelaku UMKM dan pedagang kaki lima yang menjadi fokus penelitian. Penelitian dilaksanakan selama bulan Oktober sampai November 2025. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, untuk memahami secara mendalam bagaimana pemerintah Kota Solok dalam Program Solok menuju 0% kemiskinan melalui pengembangan UMKM sektor informal di kawasan Pasar Raya Solok. Pendekatan kualitatif menekankan pada pemahaman konteks sosial secara holistik melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian (Moleong, 2019).

---

Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang dengan kriteria pedagang kaki lima/UMKM yang beraktivitas di Pasar Raya Solok serta masyarakat sekitar yang berinteraksi langsung dengan aktivitas perdagangan tersebut. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sumber data dengan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan dan tujuan penelitian (Sugiyono, 2018). Teknik ini digunakan agar peneliti memperoleh informan yang benar-benar memahami fenomena dan sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam untuk menggali perspektif dan pengalaman subjek secara kualitatif, serta melalui observasi lapangan untuk mencatat dan menganalisis perilaku dan konteks yang terjadi secara nyata, serta menggunakan dokumentasi untuk bukti pendukung. Etika penelitian dijaga dengan tidak menyebutkan identitas informan, menjaga kerahasiaan data, serta meminta persetujuan sebelum dilakukan pengampilan informasi.

Sebagai dasar analisis, penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional Talcott Parsons. Parsons menjelaskan bahwa masyarakat bekerja layaknya suatu sistem yang saling berhubungan, setiap elemen memiliki fungsi untuk menjaga keteraturan sosial (Ritzer, 2012). Dalam konteks penelitian ini, keberadaan UMKM dan pedagang kaki lima dipahami sebagai bagian dari struktur sosial ekonomi masyarakat yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi di tengah kondisi pasar tradisional. Ketika elemen-elemen sistem ini tidak berjalan dengan baik, maka akan memicu ketidakseimbangan sosial dan ekonomi di lingkungan Pasar Raya Solok.

## Hasil dan Pembahasan

Secara geografis Pasar Raya Solok terletak di pusat Kota Solok, yang memiliki luas wilayah sekitar 59,72 km<sup>2</sup> dan ketinggian kurang lebih 390 meter di atas permukaan laut. Kota Solok diperkirakan memiliki jumlah penduduk sekitar 77.842 jiwa pada pertengahan 2023 (BPS, 2023). Pasar Raya Solok menjadi salah satu pusat perdagangan dan aktivitas ekonomi masyarakat informal serta UMKM di kota tersebut. Pemerintah Kota Solok melalui program revitalisasi pasar dan kebijakan penanggulangan kemiskinan berupaya menjadikan Solok menuju 0% kemiskinan, sehingga aspek implementasi program-program tersebut terhadap pedagang kaki lima/UMKM di Pasar Raya Solok menjadi fokus utama penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan sebagai berikut:

### UMKM Belum Dioptimalkan sebagai Alat Pengentas Kemiskinan

UMKM sebagai strategi penanggulangan kemiskinan dapat dipahami sebagai upaya penguatan ekonomi berbasis masyarakat untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mengurangi kerentanan sosial. Efektivitas UMKM sebagai strategi penanggulangan kemiskinan masih bergantung pada dukungan kebijakan pemerintahan, ketersediaan modal, dan akses terhadap program pemberdayaan. Tapi belum dioptimalkan sebagai alat pengentas kemiskinan seperti yang diungkapkan oleh Ibu P (52 tahun):

“...UMKM di Kota Solok memiliki peran strategis dalam penanggulangan kemiskinan, bahkan sangat membantu, namun diperlukan intervensi yang tepat sasaran, agar tidak ada namanya tidak tepat sasaran dan masih belum bisa dikatakan saat ini sebagai alat pengentas kemiskinan...” (Wawancara 8 November 2025).

Pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa UMKM diposisikan sebagai mekanisme struktural ekonomi yang memberikan peluang pendapatan, tetapi masih terkendala oleh keberadaan hambatan institusional dan kebijakan yang belum menyentuh kebutuhan pelaku usaha secara merata. Artinya, program pemerintahan belum sepenuhnya efektif dalam mencapai target penurunan kemiskinan

### Hambatan dalam Administrasi yang Rumit dan Keterbatasan Modal

Salah satu hambatan yang paling nyata dirasakan oleh pelaku UMKM di Solok adalah proses administrasi yang rumit dan buruknya akses informasi tentang program bantuan pemerintah. Kondisi ini menyebabkan banyak pelaku usaha kecil tidak mendapatkan bantuan yang sebenarnya menjadi hak mereka. Di samping itu, keterbatasan modal menjadi penghalang serius dalam pengembangan usaha. Banyak UMKM harus bertahan dengan modal seadanya dan takut mengambil pinjaman karena risiko bunga tinggi. Akibatnya, pelaku UMKM memilih stagnasi demi menjaga kelangsungan usaha dibandingkan mengambil risiko ekspansi yang bisa berujung pada kerugian. Menurut penjelasan dari bapak Tirta Persada (56 tahun) menyatakan bahwa:

“...Bapak belum pernah dapat bantuan seperti itu nak dan kami di bawah ini jarang mendapatkan bantuan. Kami tidak tahu harus mendaftar ke mana nih, dan jika pun tahu, persyaratannya seringkali membingungkan, kadang kami merasa, yang dapat bantuan itu hanya orang-orang yang dekat saja, yang punya kenalan di kantor pemerintahan jadi bapak juga tambah malas juga untuk mengurusnya...” (Wawancara tanggal 8 November 2025).

Kutipan di atas menunjukkan adanya persoalan akses dan kepercayaan terhadap program bantuan pemerintah. Informan merasakan bahwa bantuan cenderung tidak merata dan sulit dijangkau oleh masyarakat bawah karena ketidaktahuan prosedur, kerumitan persyaratan, serta adanya persepsi bahwa bantuan hanya diberikan kepada orang yang memiliki jaringan atau kedekatan dengan aparat. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan apatisme, sehingga masyarakat yang membutuhkan justru enggan mengurus bantuan tersebut. Keterbatasan modal juga dikeluhkan oleh Ibu S (43 tahun):

"...Selama ini saya cuma bisa produksi dalam jumlah kecil, modal dari hasil jualan kemarin, ya buat beli bahan hari ini. Pengen sekali beli mesin pengiris supaya produksi lebih cepat dan hasilnya rapi, tapi duitnya dari mana, sempat kepikiran mau ajukan KUR, tapi bunganya bikin dagangan seperti kerja untuk bayar bank saja. Saya takut usaha yang susah dibangun ini malah bangkrut karena utang, akhirnya saya mengurungkan niat dan bertahan seperti ini saja..." (Wawancara 8 November 2025).

Kutipan tersebut menggambarkan tantangan struktural yang dihadapi pelaku UMKM skala kecil dalam mengembangkan usahanya. Informan menunjukkan kondisi keterbatasan modal yang membuat produksi hanya dapat berjalan dalam skala kecil dan bergantung pada pemasukan harian. Meskipun ada keinginan untuk meningkatkan kapasitas melalui teknologi produksi, hambatan finansial dan risiko utang perbank menjadi penghalang. Kekhawatiran terhadap bunga pinjaman dan risiko gagal bayar menciptakan rasa takut untuk berkembang, sehingga pelaku usaha memilih bertahan pada kondisi yang sama daripada mengambil risiko yang terlalu besar. Kutipan ini merefleksikan persoalan akses permodalan, ketakutan terhadap risiko finansial, dan lemahnya dukungan yang sesuai kebutuhan UMKM kecil.

#### **Keterbatasan Literasi Digital dan Kesenjangan Akses Bantuan**

Selain kendala administratif dan modal, literasi digital yang rendah menjadi penghambat penting bagi UMKM untuk mengakses peluang pasar yang lebih luas lewat teknologi digital. Banyak pelaku UMKM tradisional yang menyadari potensi pemasaran digital, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan teknis dan strategi praktis untuk memanfaatkan platform online secara efektif. Hal ini menciptakan jurang digital yang memisahkan pelaku usaha muda dan modern dengan pelaku usaha tradisional yang tetap menggunakan cara lama. Kesenjangan akses bantuan juga semakin terasa karena prosedur pendukung yang kompleks dan program pelatihan yang tidak sesuai kebutuhan nyata UMKM mikro. Akibatnya, bantuan pemerintah belum menyentuh kebutuhan paling mendesak seperti perbaikan kios dan modal kerja, sehingga memperkuat siklus ketidakberdayaan seperti Bapak D (44 tahun) mengungkapkan:

"...Saya lihat anak-anak muda sekarang jualan lewat TikTok laris-laris, saya ingin promosikan sate saya supaya dikenal lebih luas dan bisa dipesan lewat ojek online, tapi bingung mulai dari mana, buat video menarik itu seperti apa, ngatur pesanan online itu ribet tidak, saya cuma bisa urusan bakar-bakar sate dan ngobrol dengan pelanggan, soal urusan online benar-benar buta, jadi saya bertahan dengan cara lama dulu..." (Wawancara 8 November 2025).

Kutipan di atas menjelaskan adanya kesenjangan literasi digital pada pelaku usaha tradisional di tengah perkembangan teknologi pemasaran dan layanan online. Informan menyadari peluang besar yang ditawarkan platform digital seperti TikTok atau layanan pesan antar untuk memperluas pasar, namun keterbatasan pengetahuan dan keterampilan teknologi membuatnya ragu untuk memulai. Kondisi ini mencerminkan bagaimana perkembangan digital memberi peluang sekaligus tantangan, pelaku usaha yang tidak memiliki kemampuan digital cenderung tertinggal dan akhirnya tetap mempertahankan cara-cara lama meskipun kurang kompetitif. Kutipan ini menegaskan bahwa literasi digital menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan UMKM, tetapi belum mampu dijangkau oleh semua pelaku usaha.

Kesenjangan akses bantuan juga dirasakan oleh Ibu PA (50 tahun) yang menyatakan bahwa:

"...Banyak program pemerintah kami dengar, tapi bagi kami di pasar ini mana bisa urus, surat-surat saja tidak paham, NPWP, NIB itu untuk apa, kami jualan bawang saja sudah repot. Yang dapat biasanya yang punya toko besar atau kenalan di dalam, saya pernah ikut pelatihan jualan online, tapi bawang beda dengan baju, orang beli harus lihat barang langsung, kami lebih butuh bantuan perbaikan kios bocor dan tambahan modal beli barang partai besar supaya harga murah..." (Wawancara 8 November 2025).

Kutipan di atas menggambarkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil pelaku usaha kecil di pasar tradisional. Informan menunjukkan bahwa program bantuan atau pelatihan yang tersedia sering kali tidak dapat diakses karena keterbatasan pengetahuan administratif dan prosedural, sehingga hanya pihak-pihak tertentu yang mampu memanfaatkannya. Selain itu, informan merasa bahwa bentuk bantuan yang diberikan tidak selalu sesuai dengan karakteristik usaha mereka, misalnya pelatihan jualan online dianggap kurang relevan untuk komoditas yang harus dilihat langsung seperti bawang. Karena

itu, mereka lebih membutuhkan bantuan yang bersifat praktis dan langsung menyentuh persoalan di lapangan, seperti perbaikan fasilitas pasar dan tambahan modal. Kutipan di atas mencerminkan adanya ketidaksesuaian program, minimnya akses informasi, serta ketidakmerataan dukungan yang dirasakan oleh pelaku UMKM kecil.

### Pembahasan

Program "Kota Solok Menuju 0% Kemiskinan" melalui pengembangan UMKM merupakan upaya strategis yang sejalan dengan temuan berbagai penelitian, termasuk studi (Mulia & Sitepu, 2023) yang menegaskan bahwa UMKM berperan sebagai tulang punggung perekonomian dan agen perubahan dalam mengurangi kemiskinan. Namun, implementasinya di lapangan menghadapi sejumlah tantangan struktural-fungsional yang juga tercermin dalam studi-studi lain, seperti yang diungkap oleh yang menyoroti perlunya pendekatan yang holistik dan inklusif dalam pemberdayaan UMKM.

Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons dengan skema AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) memberikan kerangka teoretis yang relevan untuk menganalisis disfungsi dalam sistem program UMKM di Kota Solok. Menurut Parsons, sebuah sistem sosial harus memenuhi empat fungsi pokok agar dapat bertahan dan berfungsi dengan baik. Dalam konteks program UMKM di Solok, fungsi Adaptation (penyesuaian dengan lingkungan dan pengelolaan sumber daya) mengalami gangguan, sebagaimana tercermin dalam kesenjangan akses pelaku UMKM terhadap sumber daya program. Pelaku UMKM yang tidak memiliki jaringan dengan aktor-aktor kunci di pemerintahan mengalami eksklusivitas sistemik, sebagaimana tercermin dalam pernyataan pelaku UMKM: "Yang dapat bantuan itu hanya orang-orang yang 'dekat' saja, yang punya kenalan di kantor pemerintahan." Fenomena ini sesuai dengan temuan (Fahmi et al, 2018) mengenai pentingnya koordinasi kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan.

Selain Adaptation, fungsi Goal Attainment (pencapaian tujuan) juga mengalami distorsi. Bourdieu mendefinisikan modal budaya sebagai pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan yang dimiliki individu. Rendahnya pemahaman administrasi di kalangan pelaku UMKM, seperti ketidaktahuan mengenai prosedur NPWP dan NIB, mencerminkan defisit modal budaya yang menghambat mereka dalam mengakses sumber daya yang seharusnya tersedia. Kondisi ini menghalangi sistem dalam mencapai tujuannya, di mana mereka yang sudah memiliki modal budaya yang memadai semakin diuntungkan oleh sistem, sebagaimana diidentifikasi dalam penelitian (Bella, 2024) mengenai hambatan birokrasi.

Lebih jauh, fungsi Integration (integrasi) yang bertujuan menciptakan koordinasi dan solidaritas antar bagian sistem juga tidak berjalan optimal. Pelaku UMKM yang telah memiliki nama dan reputasi cenderung lebih mudah mendapatkan pengakuan dan akses terhadap program bantuan, sementara pelaku UMKM kecil yang belum memiliki legitimasi yang kuat justru semakin terpinggirkan. Fenomena ini menunjukkan bagaimana subsistem dalam program ini tidak terintegrasi dengan baik, sehingga menciptakan dan mempertahankan struktur ketimpangan yang ada. Parsons juga memperkenalkan fungsi Latency (pemeliharaan pola), yang mencakup pengelolaan ketegangan dan pemeliharaan nilai-nilai. Dalam konteks Solok, penerimaan pelaku UMKM terhadap ketidakadilan distribusi bantuan sebagai "nasib" atau "takdir" mencerminkan bagaimana ketegangan dalam sistem tidak dikelola dengan baik dan nilai-nilai ketidakadilan justru berpotensi terpelihara, sebagaimana tergambar dalam pernyataan: "Akhirnya ya saya mengurungkan niat dan bertahan seperti ini saja."

Dengan demikian, melalui lensa teori Parsons, kegagalan program UMKM di Kota Solok tidak hanya sekadar masalah teknis administratif, tetapi lebih mendalam lagi merupakan masalah disfungsi sistemik dalam memenuhi keempat prasyarat fungsional. Pendekatan kebijakan yang hanya berfokus pada aspek teknis tanpa mempertimbangkan keempat fungsi AGIL secara keseluruhan akan cenderung gagal dalam menciptakan transformasi sosial yang substantif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik yang tidak hanya menyediakan bantuan modal ekonomi, tetapi juga membangun modal sosial melalui penguatan jaringan, meningkatkan modal budaya melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan, serta memperkuat modal simbolik melalui pengakuan dan legitimasi terhadap semua pelaku UMKM tanpa diskriminasi, sebagaimana diusulkan dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang prinsip kebersamaan dan berkeadilan.

Salah satu masalah utama yang dihadapi pelaku UMKM di Kota Solok adalah kesulitan administrasi dalam mengakses bantuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian (Fahmi et al, 2018) yang menyatakan bahwa birokrasi yang berbelit dan kurangnya sosialisasi menjadi penghambat utama efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Pelaku UMKM seperti Tirta Persada mengungkapkan bahwa mereka tidak hanya kekurangan informasi, tetapi juga merasa terdiskriminasi akibat persepsi bahwa bantuan hanya sampai pada pihak yang memiliki kedekatan dengan pemerintah. Fenomena ini mencerminkan kesenjangan kebijakan antara tingkat perencanaan dan implementasi, yang juga disinggung dalam penelitian (Bella, 2024) mengenai pentingnya transparansi dan pendampingan dalam program pemberdayaan.

Selain itu, keterbatasan modal menjadi penghambat signifikan bagi perkembangan UMKM. Seperti yang diungkap Ibu S, banyak pelaku usaha yang terjebak dalam siklus produksi terbatas karena tidak

memiliki akses ke pembiayaan yang terjangkau. Studi [Hermawan et al. \(2024\)](#) menyebutkan bahwa akses permodalan merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan daya saing UMKM. Namun, skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang seharusnya menjadi solusi justru dianggap berisiko tinggi akibat bunga yang membebani. Hal ini memperkuat argumen mengenai vicious circle of poverty, di mana keterbatasan modal menyebabkan produktivitas rendah, pendapatan minim, dan akhirnya memperkuat jerat kemiskinan.

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM. Seperti yang dialami Bapak D, keinginan untuk memanfaatkan platform digital tidak diiringi dengan kapasitas teknis yang memadai. Penelitian di Kota Cilegon oleh [Bella \(2024\)](#) juga mengidentifikasi hal serupa, di mana UMKM kesulitan beradaptasi dengan teknologi digital akibat kurangnya pelatihan dan pendampingan. Padahal, dalam era ekonomi digital, kemampuan memanfaatkan teknologi menjadi penentu daya saing yang krusial, sebagaimana ditekankan oleh [Firdha \(2022\)](#).

Kesenjangan akses bantuan juga tampak jelas dalam pengalaman Ibu PA, yang menyoroti ketidakrelevanan program pelatihan dengan kebutuhan riil di lapangan. Pelatihan digital marketing, misalnya, kurang bermanfaat bagi pedagang bahan pangan yang lebih membutuhkan perbaikan infrastruktur atau modal kerja. Temuan ini sejalan dengan kritik yang disampaikan oleh [Fahmi et al \(2018\)](#) bahwa program pemberdayaan seringkali bersifat top-down dan tidak menyentuh akar permasalahan yang dihadapi UMKM. Dari perspektif kebijakan, program penanggulangan kemiskinan melalui UMKM di Kota Solok perlu dilakukan reorientasi pendekatan dari sekadar pemberian bantuan menjadi pendampingan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan. Seperti yang diusulkan dalam UU No. 20 Tahun 2008, pemberdayaan UMKM harus mengedepankan prinsip kemandirian, kebersamaan, dan berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyederhanaan prosedur, pendampingan teknis, serta pelatihan yang kontekstual.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan dunia usaha menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM. Seperti yang diimplementasikan di Kota Cilegon, kemitraan dengan retail dan perbankan dapat memperluas akses pemodal dan pemasaran. Pendekatan serupa dapat diadopsi di Kota Solok untuk memastikan bahwa UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan berdaya saing. Program “Kota Solok Menuju 0% Kemiskinan” melalui UMKM memiliki potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan jika didukung dengan implementasi yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Namun, tantangan administrasi, keterbatasan modal, rendahnya literasi digital, dan kesenjangan akses bantuan masih menjadi penghambat serius. Perlu upaya sistematis untuk menyelaraskan kebijakan dengan kondisi riil di lapangan, serta memperkuat sinergi antar-pemangku kepentingan agar UMKM dapat benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan ujung tombak penanggulangan kemiskinan.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program “Kota Solok Menuju 0% Kemiskinan” melalui penguatan UMKM masih belum berjalan optimal. Hambatan utama yang muncul adalah sulitnya akses bantuan akibat birokrasi yang rumit, rendahnya literasi administrasi dan digital, serta keterbatasan modal yang membuat banyak pelaku UMKM hanya mampu bertahan pada usaha berskala kecil. Selain itu, program yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM, terutama di sektor informal yang membutuhkan bantuan praktis seperti pendampingan usaha, perbaikan sarana, dan akses permodalan yang terjangkau. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya dukungan kebijakan yang tepat sasaran, kolaboratif, dan memperhatikan kondisi riil pelaku UMKM. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem pendampingan, sosialisasi program, dan distribusi bantuan agar UMKM benar-benar dapat berfungsi sebagai strategi pengentasan kemiskinan di Kota Solok. Tantangan peneliti saat melakukan penelitian ke Pasar raya Solok adalah sulitnya mencari informan dikarenakan kesibukan jual beli. Penelitian ini penting untuk dilanjutkan oleh riset berikutnya karena tantangan dalam pengembangan UMKM dipengaruhi oleh faktor yang lebih kompleks, seperti kesiapan infrastruktur, literasi digital masyarakat, serta koordinasi antar lembaga pemerintah.

## Rujukan

- Antoni, S. (2023). TKPKD Kota Solok Upayakan Percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Artikel Berita Antara Sumbar.
- Ariani, A. D., Zouly, D., Cahyono, I., & Azizah, R. N. (2024). Pemberdayaan UMKM sebagai Strategi Pemerintah untuk Mengurangi Kemiskinan di Indonesia Tahun 2020 – 2023. *JESS: Journal of Economics and Social Sciences*, 3(2), 91–103.

- 
- Atla, M. D. Z. F. (2021). Analisis Dampak Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Masa Pandemi. *Inspire Journal: Economics and Development Analysis*, 1(2), 199-212..
- Bella, J. C. (2024). Pengaruh Pembiayaan Modal Ventura terhadap Pengembangan dan Pertumbuhan UMKM di Kota Serang. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)*, 2(2), 117-132.
- BPS. (2023). *Penduduk kota solok tahun 2023*. BPS Kota Solok.
- Diana Nur Khoiriyah, F. A. (2023). Dampak inklusi dan literasi keuangan terhadap ketimpangan pendapatan melalui kredit UMKM di Indonesia tahun 2016 dan 2019. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1), 16–31.
- Dinas Koperasi UMKM sumbar. (2023). Sumbar PLUT-In.
- Diwayana, P. & Burhanuddin, B. (2023). Analisis Eksistensi UMKM dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Edunomika*, 07(01), 1–12.
- Ellya, R. (2019). Kemiskinan Dalam Perspektif Struktural Fungsional. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 14(1), 19-34.
- Fahmi, G. R. A., Setyadi, S., & Suiro, U. (2018). Analisis strategi penanggulangan kemiskinan di provinsi banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 8(2).
- Ferdiana, Y., Abidin, M., Maharani, V., & Indra, C. (2023). Jurnal Ekonomi Pembangunan The Role of Micro , Small and Medium Enterprises ( MSMEs ). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(02), 98–114.
- Firdha, W. (2022). *Dinamika Perubahan Sosial Masyarakat di Masa Pandemi*. Wawasan Ilmu.
- Hermawan, M. F., Salsabila, R., & Saputra, I. M. (2024). Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(3), 341-350.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Kinerja UMKM Indonesia 2023*. Jakarta: KemenkopUKM.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulia, Y., & Sitepu, R. (2023). Peran UMKM dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 1(2), 99-108.
- Pratama, D. A., et al. (2022). Peran UMKM dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Publikasi Manajemen Dan Teknik*, 3(2), 165–175.
- Ridho, D. (2023). Kemiskinan dalam novel dekat dan nyaring karya sabda armandio alif (tinjauan sosiologi sastra). *Jurnal Sastra Indonesia*, 12 (1), 15–29.
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sacipto, H. D., & Rachmawati, Y. T. (2022). Strategi Pengembangan UMKM dalam Pengentasan Kemiskinan di Masa Pandemi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1),., 1-12.
- Siagian, F. G., Fajri, S., & Marpaung, M. (2025). Pemberdayaan UMKM dalam Ekonomi Pembangunan Sebagai Solusi Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 108–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i1.2296>
- Sugiyono, S. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni. (2014). Persepsi Masyarakat Terhadap Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Kepada Masyarakat Miskin di Dusun II Desa Semoi II. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
-